



**KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN DENGAN POLA PERKAWINAN
PERSPEKTIF PUP DI PROVINSI PAPUA**

Mona Safitri Fatiah 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

Info Artikel

Diterima 10-01-2023

Disetujui 23-03-2023

Diterbitkan 31-01-2023

Kata Kunci:

Pola perkawinan, Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP), & Wanita
Usia Subur (WUS)

e-ISSN:2613-9219

Akreditasi Nasional:

Sinta 4

Keywords:

*Marriage pattern, PUP,
Women of Childbearing Age*

 **Corresponding author:**

mona.s.fatihah@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menjadi program pemerintah mengingat median usia kawin pertama (MUKP) di Papua (20,2 tahun) yang masih di bawah MUKP Nasional (20,8 tahun), sedangkan MUKP perempuan dalam target Renstra BKKBN tahun 2020 – 2024 adalah 22 tahun. **Tujuan:** mengetahui faktor sosial ekonomi perempuan yang berhubungan dengan pola perkawinan dalam perspektif PUP di Provinsi Papua berdasarkan analisis data SDKI tahun 2017. **Metode:** penelitian *cross sectional* ini menyeleksi 414 wanita usia subur dari Provinsi Papua yang terdapat pada data SDKI tahun 2017. Variabel yang dianalisis adalah pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi, tempat tinggal, usia pertama hubungan seks pertama, dan kehamilan tidak diinginkan. Data dianalisis sampai dengan analisis secara multivariat. **Hasil:** Secara bivariat, perspektif PUP terkait dengan pendidikan ($p=0,003$), pekerjaan ($p=0,008$), strata sosial-ekonomi ($p=0,001$), tempat tinggal ($p=0,001$), dan usia hubungan seks pertama ($p=0,001$), sedangkan secara multivariat ada tiga faktor, yaitu pendidikan ($p=0,002$; OR=0,6 dan 95% CI=0,32-1,38), pekerjaan ($p=0,08$; OR=1,89 dan 95% CI=0,92-3,85), dan usia hubungan seks pertama ($p=0,001$; OR=71,95 dan 95% CI=33,2-156,0). **Kesimpulan:** Pendidikan merupakan protektif terhadap perspektif PUP sedangkan pekerjaan dan usia hubungan seks pertama sebagai faktor risiko. Kerjasama lintas sektoral bagi pemerintah Provinsi Papua dengan Dinas PUPR dan Dinas pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pendidikan dan memberantas buta huruf pada masyarakat di daerah pedalaman.

Abstract

Background: Marriage age maturity (MAM) is a government program considering the median age of first marriage (MAFM) in Papua (20.2 years) is still below the National MAFM (20.8 years), while women's MAFM is in the 2020 BKKBN Strategic Plan target – 2024 is 22 years. **Objective:** to find out the socio-economic factors of women related to marriage patterns in the perspective of PUP in Papua Province based on analysis of 2017 IDHS data. Method: This cross-sectional study selected 414 women of childbearing age from Papua Province who was included in the 2017 IDHS data. Variables analyzed are education, occupation, social economy, place of residence, age at first sexual intercourse, and unwanted pregnancy. Data were analyzed up to multivariate analysis. **Results:** Bivariate analysis showed that MAM perspective related to education ($p=0.003$), occupation ($p=0.008$), socio-economic strata ($p=0.001$), place of residence ($p=0.001$), and age of first sexual intercourse ($p=0.001$), while in multivariate terms there were three factors, namely education ($p=0.002$; OR=0.6 and 95% CI=0.32-1.38), occupation ($p=0.08$; OR=1.89 and 95% CI=0.92-3.85), and age of first sexual intercourse ($p=0.001$; OR=71.95 and 95% CI=33.2-156.0) **Conclusion:** Education is protective against the perspective of MAM while employment and age of first sexual intercourse as a risk factor. Cross-sectoral collaboration between the Papua Provincial government with the PUPR Service and the Education Office is needed to improve education and eradicate illiteracy in people in rural areas

PENDAHULUAN

Pernikahan anak (*Child marriage*) terjadi jika seorang peredan hal ini termasuk pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia (HAM) karena dapat merugikan atau membahayakan perkembangan kesehatan reproduksi perempuan^{1,2}. Secara global sebanyak 21% remaja mengalami kondisi ini atau sekitar 650.000.000 anak perempuan per tahun³. Pola perkawinan anak diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu perempuan yang menikah sebelum usia 15 dan 15 – 18 tahun⁴. Proporsi pernikahan di usia 15 – 18 tahun lebih tinggi jika dibandingkan usia sebelum 15 tahun (sebesar 5,5%)⁵.

Pernikahan anak merupakan masalah yang menjadi fokus dunia. Wilayah Asia Timur dan Pasifik memiliki proporsi terendah pada tahun 2019, sebesar 7%¹. Proporsi pernikahan anak di Indonesia termasuk tinggi, yaitu 11,5% pada tahun 2017⁶, dan menurun 0,3% di tahun 2018 (11,2%)⁸. Proporsi ini masih di atas target WHO untuk tahun 2030, sebesar 10%⁹.

Indicator proporsi pernikahan anak di Indonesia menggunakan nilai Median Umur Kawin Pertama (MUKP) wanita usia 15 – 49 tahun dimana pada tahun 2012 sebesar 20,1 tahun¹⁰ dan menjadi 20,8 tahun pada tahun 2017⁷, ada kenaikan sekitar 0,7 tahun. MUKP di Provinsi Papua sebesar 20,2 tahun⁷, dan masih di bawah target Renstra BKKBN tahun 2020 – 2024, yaitu 22 tahun¹¹.

MUKP yang rendah terkait erat dengan masalah kependudukan¹¹, yang berdampak pada kenaikan *Total Fertility Rate* (TFR) dengan peningkatan risiko kehamilan yang tinggi¹⁰. TFR Provinsi Papua 3,31 dan masih sangat tinggi dibandingkan dengan TFR nasional yaitu 2,4⁷. Dampak lain yang dirasakan oleh perempuan adalah kehamilan, berisiko, kerentanan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian di usia muda^{12,13}. Upaya mencegah dampak pernikahan dini dilakukan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)¹³ di mana perempuan dapat kawin pada usia minimum 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Usia tersebut telah memungkinkan pasangan tersebut siap secara fisik, mental, psikis, sosiologis, dan ekonomis sehingga dapat terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera¹².

Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak adalah niat untuk melakukan dan dorongan faktor sosial dan ekonomi,^{15,16} termasuk pendidikan^{6,18}, berstatus sosial rendah,¹⁹ dan sosial ekonomi²⁰. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi faktor sosial dan ekonomi wanita usia 15 – 49 tahun dengan pola pernikahan dalam perspektif PUP di Provinsi Papua, setelah dikontrol variabel perancu.

METODE

Penelitian *cross sectional* ini memanfaatkan data SDKI Wanita usia subur (WUS) tahun 2017, di mana pelaksanaan pengambilan data SDKI ini dilakukan selama

pada bulan Agustus – September 2020. Sampel penelitian menggunakan seluruh populasi, yaitu semua WUS pernah kawin sebelum menginjak usia 24 tahun di Provinsi Papua sejumlah 414 responden. Variabel penelitian mencakup: pendidikan (dasar (SD-SMP) dan menengah ke atas (SMA/SMK-PT)), pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja [ibu rumah tangga]), usia hubungan seks pertama (≤ 20 tahun dan > 20 tahun), sosial ekonomi (kuintil 1-2 dan kuintil 3-5), tempat tinggal (urban dan rural), dan kehamilan tidak diinginkan (ya atau tidak). Data SDKI 2017 pada penelitian ini diperoleh dari raw data pada laman www.measuredhs.com, setelah surat permintaan data di tingkat fakultas diupload ke laman website dan disetujui. Data diolah dengan menggunakan *software* STATA 14 dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat (regresi logistic) untuk pemodelan faktor risiko. Penelitian ini telah lulus kaji etik dengan kode: ICF IRB FWA00000845

HASIL

Dari 414 orang WUS, tiga perempuan diantara mereka menikah pada usia di bawah 20 tahun. Proporsi responden berpendidikan menengah ke atas lebih tinggi 17,8% daripada responden berpendidikan dasar. Proporsi responden yang bekerja lebih dari dua kali lipat daripada responden yang tidak bekerja. Mayoritas responden tinggal di pedesaan (79,5%). Pengalaman hubungan seks pertama pada usia di bawah 20 tahun dialami lebih dari 77% responden, namun hanya sekitar 16% yang menghadapi masalah kehamilan tidak diinginkan (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi WUS Menurut Karakteristik

Variabel	n	%
Pendidikan		
Menengah ke atas	244	58,9
Dasar	170	41,1
Pekerjaan		
Bekerja	290	70,0
Tidak bekerja (IRT)	124	30,0
Tempat Tinggal		
Perkotaan (<i>Urban</i>)	85	20,5
Perdesaan (<i>Rural</i>)	329	79,5
Usia saat hubungan seks pertama		
Lebih dari 20 tahun	92	22,2
Di bawah 20 tahun	322	77,8
Kehamilan Tidak di Inginkan (KTD)		
Diinginkan	348	84,1
Tidak diinginkan	66	15,9

WUS yang menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat di Provinsi Papua memiliki peluang sebesar 1,1 kali untuk menikah pada usia di atas 20 tahun ($p=0,003$ dan nilai $OR=1,1$ rentang nilai 95% $CI=1,17$

- 3,11). Status pekerjaan WUS merupakan faktor proteksi agar WUS bisa menikah pada usia di atas 20 tahun ($p=0,008$ dan $OR=0,92$ dengan rentang nilai 95% $CI=0,56-1,51$). WUS pada sosial ekonomi (Sosek) dengan kategori Sosek pada kuintil 3-5 berpeluang sebesar 2,3 kali menikah pada usia di atas 20 tahun ($p=0,001$ dan $OR=2,3$ dengan nilai rentang 95% $CI=1,49-5,13$) yang dapat terlihat pada Tabel 2.

WUS yang tinggal pada daerah *urban* Provinsi Papua memiliki peluang sebesar 3,06 kali menikah pada usia di atas 20 tahun ($p=0,001$ dan $OR=3,06$ dengan nilai 95% $CI=1,83-5,13$). *Sex intercourse* pertama merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan perilaku perkawinan dalam perspektif PUP, di mana WUS di Provinsi Papua yang memiliki *sex intercourse* pertama diatas 20 tahun berpeluang sebesar 55 kali kawin usia di atas 20 tahun ($p=0,001$ dan $OR=55,0$ dengan rentang nilai 95% $CI=27,6-109,7$). KTD merupakan salah satu faktor yang tidak memiliki hubungan perkawinan dalam perspektif PUP ($p=0,723$ dan nilai $OR=1,12$ dengan rentang nilai 95% $CI=0,6-2,14$) (Tabel 2).

Tabel 2. Hubungan antara Pendidikan, Pekerjaan, Status Sosial Ekonomi, Tempat Tinggal dan Sex Intercourse dengan Perkawinan berperspektif PUP di Papua

Variabel	Usia perkawinan dalam perspektif PUP (tahun)				P	OR (95% CI)
	≥ 20		< 20			
	n	%	n	%		
Pendidikan						
Menengah ke atas	75	31,3	169	68,7	0,003	1,1 (1,17 – 3,11)
Dasar	32	19,3	138	80,7		
Pekerjaan						
Bekerja	73	25,5	217	74,5	0,008	0,92 (0,56 – 1,51)
Tidak bekerja	34	27,1	90	72,9		
Sosial ekonomi						
Kuintil 3 – 5	42	40,4	62	59,6	0,001	2,3 (1,49 – 3,97)
Kuintil 1 – 2	65	21,8	245	78,2		
Tempat tinggal						
Perkotaan (<i>Urban</i>)	38	45,7	47	54,3	0,001	3,06 (1,83 – 5,13)
Perdesaan (<i>Rural</i>)	69	21,6	260	78,4		
Umur pertama kali melakukan hubungan seksual						
≥ 20 tahun	93	74,2	34	25,8	0,001	55,0 (27,6 – 109,7)
< 20 tahun	14	5,0	273	95		
Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD)						
Diinginkan	88	26,3	247	73,7	0,723	1,12 (0,6 – 2,14)
Tidak diinginkan	15	24,1	47	75,9		

Hasil akhir dari analisis ini diperoleh bahwa adanya peran anatara pendidikan dan pekerjaan WUS dengan perilaku perkawinan dalam perspektif PUP setelah dikontrol oleh variabel perancu berupa *sex intercourse* pertama, yang mana pendidikan menjadi faktor proteksi WUS di Provinsi Papua agar memiliki perilaku perkawinan dalam perspektif PUP ($p=0,002$ dan $OR=0,66$ dengan nilai rentang 95% $CI=0,23-1,38$). WUS yang bekerja memiliki peluang sebesar 1,89 kali lebih besar untuk memiliki perilaku perkawinan dalam perspektif PUP ($p= 0,008$ dan nilai $OR=1,89$ dengan nilai rentang 95% $CI=0,92-3,85$) yang dapat terlihat pada Tabel 3. Kedua faktor (pendidikan dan pekerjaan perempuan)

ini mempengaruhi sekitar 43,5% perempuan untuk menikah dalam perspektif PUP.

Tabel 3. Hasil Akhir Regresi Logistik

Variabel	B	SE	p value	OR (95% CI)
Pendidikan	0,415	0,376	0,002	0,66 (0,32 – 1,38)
Pekerjaan	-0,634	0,364	0,008	1,89 (0,92 – 3,85)
<i>sex intercourse</i> pertama	-4,276	0,394	0,001	71,95 (33,2 – 156)

PEMBAHASAN

Program PUP sendiri menysasar pada perilaku remaja agar bisa menunda perkawinan sampai dengan perempuan menikah minimal usia 20 tahun bagi dan laki – laki menikah minimal 25 tahun sebagai pertimbangan dari segi kesehatan bagi wanita yang menikah pada umur 20 tahun tidak akan memiliki risiko pada saat kehamilan¹², namun dalam penelitian ini hal tersebut belum tergambar di mana pada penelitian ini diperoleh hanya seperempat (25,8 persen) dari WUS di Provinsi Papua yang menikah sesuai dengan kategori dalam Perspektif PUP. Jika hal ini kita telusuri pada beberapa survei sebelumnya, juga menemukan hal yang sama, diantaranya hasil survey yang dilakukan oleh BKKBN yang menghasilkan jika MUKP WUS usia 15-49 tahun tahun 2017 sebesar 20,8 tahun⁷, hasil survey tersebut juga hampir sama dengan hasil survey di Nepal mempublikasi bahwa MUKP wanita usia 15 – 49 tahun sebesar 21,7 tahun²¹, namun hasil dua survey di atas masih sangat jauh di bandingkan dengan hasil survey yang ada di negara berkembang, seperti: Malaysia. Di Malaysia pada tahun 2019, WUS memiliki MUKP pada perempuan sebesar 26 tahun dan laki- laki sebesar 28 tahun²² namun hal itu lebih rendah jika kita dibandingkan dengan MUKP Singapura sebesar 30,8 tahun²³.

Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor kearifan lokal pada beberapa daerah yang ada di Papua yang menganggap jika anak sudah memasuki akhir balik harus segera dinikahkan untuk membantu meringankan ekonomi keluarga di mana pada penelitian ini persentase WUS yang memiliki kuintil kekayaan menengah ke atas hanya 25,1 persen, hal lain yang ikut berkontribusi adalah sebagian besar dari WUS yang ada di Provinsi Papua banyak tersebar di pedesaan (79,5 persen) yang mana sulitnya akses untuk mendapatkan informasi juga diduga ikut berkontribusi, serta adanya pengaruh budaya yang cukup kuat yang masih dianut oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan Papua.

Pendidikan merupakan salah satu pintu yang membuat seorang anak untuk dinikahkan oleh orang tua, kurangnya akses terhadap pendidikan serta adanya peran norma sosial yang menguatkan akses strotipe gender misalnya seorang perempuan seharusnya menikah muda juga kut berkontribusi kuat yang menjadikan anak sebagai subyek untuk segera dinikahkan oleh orang tuanya²⁴. Peningkatan pendidikan

perempuan, peningkatan tingkat urbanisasi, dan partisipasi angkatan kerja serta status kesejahteraan rumah tangga berpengaruh pada penurunan perkawinan di usia muda²⁵. Peran pendidikan tersebut dapat tergambar juga pada penelitian ini, di mana pada penelitian ini ditemukan jika variabel pendidikan merupakan salah satu faktor protektif yang menyebabkan seorang perempuan menunda pernikahan sampai usia 20 tahun.

Hal ini juga ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya bahwa sekitar 86 persen wanita usia 20 – 24 tahun yang tidak memiliki pendidikan terpaksa menikah pada usia anak²⁶. Di Etiopia sekitar 11.8 persen anak yang berusia 12 – 17 tahun terpaksa putus sekolah untuk menikah karena sudah di tentukan oleh orang tua²⁷. Laporan BPS dari 34 provinsi di Indonesia menyatakan bahwa 44,86% perempuan yang menikah pada usia di bawah umur 18 tahun banyak terjadi pada anak yang memiliki pendidikan terakhir tamat SMP/ sederaja,²⁸ bahkan 8 dari 10 perempuan yang menikah sebelum umur usia 18 tahun baru menamatkan pendidikan di kelas 1 SMP.²⁹ Peran pendidikan dalam pernikahan muda pada perempuan menunjukkan bahwa ekonomi keluarga juga ikut berkontribusi, di mana 74,9% WUS berasal dari kuintil kekayaan menengah ke bawah. Sebanyak 41,1% perempuan di Provinsi Papua hanya memiliki pendidikan SLTP ke bawah dan diduga menjadi pemicu perempuan untuk menikah yang tidak berperspektif PUP.

Angka partisipasi angkatan kerja sangat di pengaruhi oleh perkawinan anak, di mana anak yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung akan putus sekolah serta memiliki kesempatan dalam partisipasi pada pasar tenaga kerja formal sangat rendah sepanjang waktu, \anak yang menikah sebelum menginjak umur 18 tahun memiliki peluang yang sangat kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cara bekerja²⁹. Perempuan yang memiliki kesempatan kerja dan karir akan membuat pernikahan usia anak akan semakin tidak menarik, dikarenakan anak akan semakin fokus terhadap pendidikan dan karirnya, berumah tangga pada usia anak dianggap sebagai hambatan dalam kemajuan karir³⁰. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara pekerjaan dengan perilaku berperspektif PUP di Provinsi Papua setelah dikontrol dengan usia pertama melakukan hubungan seksual. Beberapa penelitian menemukan jika pekerjaan merupakan faktor dominan mempengaruhi perilaku pernikahan perempuan, di mana perempuan yang tidak memiliki pekerjaan berisiko sebesar 3,615 kali lebih besar untuk menikah pada usia anak di bandingkan dengan perempuan yang bekerja³¹. Laporan BPS menjelaskan hasil yang sama, yaitu pekerja perempuan usia antara 20 – 24 tahun berstatus menikah memiliki persentase bekerja lebih rendah dibanding yang tidak menikah, yaitu 34,41 persen²⁹.

Tidak dapat dipungkiri, jika perempuan yang memiliki pekerjaan biasanya akan lebih fokus dengan karirnya yang

berakibat pada penundaan perkawinan, di mana pada penelitian ini diperoleh banyak dari perempuan yang bekerja (70%) dibandingkan dengan yang tidak bekerja selain faktor pekerjaan peneliti menduga adanya peran sosial ekonomi yang ikut memberikan andil dalam peran pekerjaan terhadap perkawinan perempuan, di mana perempuan yang memiliki pekerjaan yang mapan akan berakibat pada *income* yang mereka hasilkan sehingga perempuan tersebut lebih *independent* karena tidak bergantung dengan orang lain.

Penelitian *cross sectional* dari data SDKI ini terdapat kelemahan dimana tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Penggunaan data SDKI memiliki keterbatasan jumlah variabel yang dapat diteliti sehingga data yang ada secara literature berhubungan dengan pola perkawinan tidak dapat di analisis. Bias recall juga mungkin terjadi pada penelitian ini di mana responden diminta untuk mengingat kembali kejadian dalam periode satu tahun terakhir mengenai perilaku kesehatan yang telah dilakukan. Kelemahan lain adalah *misclassification* dimana dalam pengambilan data SDKI ini, seperti pada variabel ekonomi yang diukur dengan *quintile wealth index* yang berdasarkan pada kepemilikan barang dan keadaan rumah antara penduduk desa dan kota yang berbeda, apalagi pada penduduk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti seseorang dianggap berada jika memiliki ternak atau lahan pertanian, meskipun memiliki rumah yang terbuat dari bambu (gubuk). Meskipun adanya keterbatasan dalam data SDKI, namun instrumen yang digunakan dinilai mempunyai kualitas yang baik, sehingga kuesioner tersebut tetap digunakan dari tahun ke tahun. Selain itu, kuesioner SDKI sendiri dipakai pula pada negara – negara lain dengan istilah *Demographic Health Survey* (DHS).

Kesimpulan

Pendidikan dan pekerjaan perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi perkawinan berdasarkan persepektif PUP. Saran: perlunya kerjasama lintas sektoral bagi pemerintah Provinsi Papua dengan Dinas PUPR dan Dinas pendidikan Provinsi Papua untuk memberantas buta huruf pada anak-anak yang ada di daerah pedalaman Papua.

Daftar Pustaka

1. Latin America dan Caribbean Regional Office. A Profile of Child Marriage and Early Unions in Latin America and the Caribbean [Internet]. Panama: UNICEF; 2019. 1–24 p. Available from: [https://www.unicef.org/lac/media/8256/file/Profile of Child Marriage in LAC.pdf](https://www.unicef.org/lac/media/8256/file/Profile%20of%20Child%20Marriage%20in%20LAC.pdf)
2. UNFPA, UNICEF. UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage. New York; 2019.
3. UNICEF. Child Marriage Around The World [Internet]. 2020. Available from: <https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world>
4. BPS, Bappenas. Prevention of Child Marriage Acceleration that Cannot Wait [Internet]. Jakarta; 2020. Available from: <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/fi>

- les/2020-06/Prevention-of-Child-Marriage-Report-2020.pdf
5. UNICEF. Child Marriage Database on Apr 2020. New York; 2020.
 6. BKKBN. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak. Jakarta; 2018.
 7. BKKBN, BPS, Kemenkes, USAID. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Jakarta; 2018.
 8. Bappenas. Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight. Jakarta; 2018.
 9. WHO. World Health Statistics 2018 (Monitoring Health for the SDGs). Geneva, Switzerland; 2018. 300 p.
 10. BPS, BKKBN, Kemenkes, International M. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: Kemenkes; 2013.
 11. BKKBN. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024. Jakarta; 2020.
 12. Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak - Hak Reproduksi Remaja. Vol. 2. Jakarta; 2010. 1–51 p.
 13. Djaja M, Gyamitri B, Alfiasari, Novita L. Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2016.
 14. Undang - Undang (UU) No.. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 2009.
 15. Lefevre J, Quiroga R, Murphy E. Reproductive health and rights-reaching the hardly reached. Article 14: Future options foreclosed: girls who marry early. International Household Survey Network. Washington DC; 2002.
 16. Does Sampoerno; Azrul Azwar; Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Usia Muda (Early Age of Marriage and Pregnancy Among Women in Indonesia). 1987;
 17. Natanael M. J., Fajar M. R. and MR. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. In: Child Poverty and Sosial Protection Conference [Internet]. The SMERU Research Institute; 2020. p. 1–27. Available from: http://csp.smeru.or.id/Paper_Abstact_CV/0102_Joseph-paper.pdf
 18. Nnadi I. Early Marriage: A Gender-Based Violence and A Violation of Women's Human Rights in Nigeria. *J Polit Law*. 2014;7(3):35–40.
 19. De Groot R, Kuunyem MY, Palermo T, Osei-Akoto I, Adamba C, Darko JK, et al. Child Marriage and Associated Outcomes in Northern Ghana: A Cross-Sectional Study. *BMC Public Health*. 2018;18(1):1–12.
 20. Natanael M. J., Fajar M. R. and MR. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Child Poverty Soc Prot Conf*. 2013;1–27.
 21. Ministry of Health Nepal, New ERA, ICF. Demographic and Health Survey Nepal 2016. Kathmandu, Nepal: Ministry of Health Nepal; 2017.
 22. Institute for Public Health (IPH). National Health and Morbidity Survey (NHMS) 2017: Key findings from the Adolescent Health and Nutrition Surveys - Infographic Booklet April 2018 [Internet]. National Health and Morbidity Survey (NHMS) 2017 Overview report. Malaysia; 2018. Available from: www.iku.gov.my
 23. Ministry of Trade & Industry Republic of Singapore, Reproducing. Statistics on Marriages and Divorces 2018 [Internet]. Department of Statistic Singapore. Singapore; 2018. http://www.singstat.gov.sg/publications/publications_and_papers/marriages_and_divorces/smd2012.pdf
 24. Bappenas. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak [Internet]. Chabibah U, editor. Jakarta: Bappenas; 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
 25. Yüksel-Kaptanoğlu İ, Ergöçmen BA. Early Marriage: Trends in Turkey, 1978-2008. *J Fam Issues*. 2014;35(12):1707–24.
 26. Wodon Q, Male C, Nayihouba A, Onagoruwa A, Savadogo A, Yedan A, et al. Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report. *J Glob Health*. 2017;7(1).
 27. Wodon Q, Male C, Nayihouba A, Onagoruwa A, Svadogo A, Yedan A, et al. Economic Impacts of Child Marriage: ethiopia Synthesis Reports. In: *The Economic Impacts of Child Marriage* [Internet]. World Bank; 2018. Available from: <https://openknowledge.worldbank.org/>
 28. BPS, Bappenas, UNICEF. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda [Internet]. Badan Pusat Statistik. Jakarta; 2020. Available from: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
 29. BPS. Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015). Revisi. *經濟研究*. Jakarta: BPS; 2017.
 30. Martinson FM. *Family in Society*. New York: Dodd, Mead & Company; 2010.
 31. Fatiah MS. Determinan Perilaku Wanita Usia 15 - 24 tahun dalam Perspektif Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok tahun 2016. Indonesia; 2016.